

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI  
MANUSIA DI ACEH PASCA *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*  
HELSINKI**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ANNISHA PUTRI ANDINI**

**NIM. 105010104111048**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

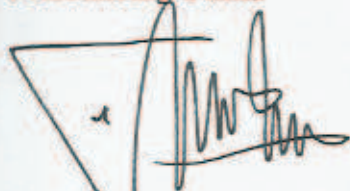
## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Artikel Ilmiah** : **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP  
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI  
ACEH PASCA MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING HELSINKI**

**Identitas Penulis** :  
**Nama** : **Annisha Putri Andini**  
**NIM** : **105010104111048**  
**Konsentrasi** : **Hukum Tata Negara**  
**Jangka Waktu Penelitian** : **4 Bulan**

Disetujui pada tanggal : 21 Januari 2014

Pembimbing Utama



Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H.  
NIP. 19780815 199903 1 003

Pembimbing Pendamping



Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.Hum.  
NIP. 19781215 200501 1 001

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Tata Negara



Herlin Wijavati, S.H., M.H.  
NIP. 19601020 198601 2 001

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI  
MANUSIA DI ACEH PASCA *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*  
HELSINKI**

Annisha Putri Andini, Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H.,

Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.H.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email: [annishaandini@gmail.com](mailto:annishaandini@gmail.com)**

**Abstrak**

Konflik RI-Aceh dimulai sejak 4 Desember 1976. Konflik tersebut berlangsung selama hampir 30 tahun dan telah menimbulkan berbagai pelanggaran HAM berat di Aceh. Lahirnya MoU Helsinki sebagai nota kesepakatan damai RI-GAM dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi harapan akan adanya penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh, yaitu dengan diaturnya ketentuan mengenai pembentukan Pengadilan HAM dan KKR Aceh. Sayangnya, beberapa pengaturan mengenai Pengadilan HAM dan KKR Aceh di dalam UUPA sebagai pelaksana MoU Helsinki masih menemukan berbagai permasalahan hukum terkait multitafsir pasal, landasan yang tidak jelas, serta tidak terbentuknya kedua lembaga sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Di dalam mekanisme internasional maupun nasional, negara harus memenuhi tanggung jawab dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya, hal ini berlaku pula saat terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Aceh dalam kerangka NKRI.

Kata Kunci: MoU Helsinki, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, hak asasi manusia, tanggung jawab negara.

**Abstract**

The conflict in Aceh started from December 4, 1976. The conflict lasted for nearly 30 years and has led to a variety of severe human rights violations in Aceh. The inception of the MoU Helsinki as memorandum peace agreement RI-GAM and Act No. 11/2006 concerning the Governing of Aceh (UUPA), give new hope for a human rights violations settlement in Aceh, which is has the regulation of the provisions regarding the establishment of a Human Rights Court and A Commission for Truth and Reconciliation. Unfortunately, some regulations of Human Rights Court and CTR Aceh in UUPA as implementing of MoU Helsinki still find a wide range of legal issues related to the legal interpretation, the unclear legal basic and the delay of Human Rights Court and CTR establishment. According to the international and national law, the state must fulfill responsibilities in respecting, protecting and fulfilling the rights of its citizens, and it applies in the case of severe human rights violations in Aceh within the NKRI.

Keyword: MoU Helsinki, Act No. 11/2006 on Governing Aceh, human rights, state responsibility.

## A. PENDAHULUAN

Dalam catatan sejarah, Aceh dikenal beberapa kali mengalami gelombang konflik. Berbagai potensi dan daya tarik Aceh yang telah dikemukakan sebelumnya juga menjadi salah satu alasan penting munculnya konflik di bumi Serambi Mekkah tersebut. Ada satu konflik tak terlupa yang mencuat sejak Hasan Di Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Laporan Tim Aceh juga menuliskan mengenai penyebab munculnya GAM di Aceh sebagai berikut:

Perjalanan sejarah kehidupan masyarakat di Aceh sarat dengan berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Sejak zaman kolonial Belanda hingga rejim orde baru, masyarakat di Aceh telah mencatatkan begitu banyak sejarah perlawanan rakyat terhadap penguasa. Ketidakpuasan rakyat Aceh sebagai akibat berbagai kebijakan dari pemerintah pusat yang dinilai diskriminatif berdampak pada munculnya berbagai gejala penentangan atau penolakan. Bahkan di antara mereka kemudian berkeinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM).<sup>1</sup>

Konflik yang telah berlangsung hampir 30 tahun telah menelan puluhan ribu jiwa dan harta benda yang tidak sedikit.<sup>2</sup> Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA) adalah komisi independen yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 88/ 1999 dan telah melaporkan hasil temuannya setelah selama enam bulan bekerja dengan melakukan dialog dengan korban, saksi, dan aktor yang berkaitan dengan kekerasan di Aceh. Dalam laporan akhirnya menyebutkan, “Tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer merupakan suatu jenis kekerasan negara (*state violence*). Artinya, kekerasan yang terjadi dipersepsikan secara kuat oleh masyarakat sebagai “dipelihara” oleh Negara dalam rangka mengamankan proses eksplorasi kekayaan alam dari Aceh untuk kepentingan pusat, kepentingan elite pusat, maupun lokal.”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sriyana ([sri\\_yana@yahoo.com](mailto:sri_yana@yahoo.com)) permohonan data melalui email, 17 Desember 2013, **Laporan Tim Aceh (BAB I & II\_091109)**, E-mail kepada Annisha Andini ([annishaandini@gmail.com](mailto:annishaandini@gmail.com)).

<sup>2</sup> Eddy MT Sianturi, 2011, **Implikasi Kesepakatan Damai MoU Helsinki terhadap Integrasi Nasional** (online), <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/implikasi-kesepakatan-damai-mou-helsinki-terhadap-integrasi-nasional>, (1 Oktober 2012).

<sup>3</sup> International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), **Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto: Laporan Bersama ICTJ dan KontraS**, tempat penerbitan tidak dicantumkan, International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2011, hlm 20.

Dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, negara merupakan pihak yang harus bertanggung jawab. Kewajiban negara untuk bertanggung jawab atas adanya pelanggaran HAM yang berat bersifat imperatif dan harus dilaksanakan, sebab jika tidak, negara bersangkutan dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan anti kepada perlindungan kemanusiaan.<sup>4</sup> Di tengah upaya negosiasi untuk mengembalikan Aceh ke pangkuan NKRI, pada tahun 2004, terjadi Gempa dan Tsunami di Aceh yang membawa hikmah tersendiri bagi perdamaian Aceh selanjutnya. Akan sulit membangun Aceh kembali pasca musibah tersebut bila antara Pemerintah RI dan GAM.

Perdamaian di Aceh dilakukan dengan penandatanganan nota kesepakatan damai MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 dan telah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh<sup>5</sup> yang merupakan turunan dari MoU Helsinki. Setelah 30 tahun berada dalam masa konflik yang menimbulkan banyaknya kasus pelanggaran HAM, tak heran muncul satu poin penting tentang HAM dari MoU tersebut. MoU Helsinki butir 2.1 hingga 2.3. mengatur tentang HAM Aceh. Ketiga butir norma MoU Helsinki tersebut memberi amanat bagi UUPA sebagai kebijakan di bawahnya, yakni Pasal 227 hingga Pasal 230 untuk mengatur lebih lanjut terkait pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Aceh. Secara definitif, baik Pengadilan HAM maupun KKR telah ditentukan tenggat waktu pembentukannya yakni satu tahun setelah UUPA diundangkan pada tahun 2006 lalu. Sayangnya hingga kini keduanya belum direalisasikan.

Ruang lingkup penelitian adalah terkait tanggung jawab negara terhadap penegakan HAM di Aceh pasca MoU Helsinki. Dari berbagai permasalahan hukum yang muncul bagi penegakan HAM di Aceh, penulis menganalisis klasifikasi pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, bentuk tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, serta permasalahan penerapan norma MoU Helsinki ke dalam UUPA terkait penegakan HAM di

---

<sup>4</sup> Suparman Marzuki, **Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity**, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 54.

<sup>5</sup> Selanjutnya dalam penulisan artikel ilmiah ini disebut UUPA.

Aceh, sebab perdamaian Aceh menjadi rangkaian sejarah politik, kemanusiaan, dan proses negosiasi inspiratif bagi dunia yang harus dijaga.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa saja jenis pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi pada masa konflik di Aceh?
2. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pada masa konflik di Aceh?
3. Apa permasalahan hukum penerapan *Memorandum of Understanding* Helsinki dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait penyelesaian kasus HAM di Aceh?

## **C. PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis dengan:<sup>6</sup> tahapan identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal berupa kasus pelanggaran HAM selama konflik Aceh dan adanya praktek impunitas terhadap pelanggaran HAM di Aceh. Peneliti telah menginventarisasi bahan-bahan hukum terkait, kemudian peneliti mengajukan pertanyaan beranjak dari peraturan terkait. Langkah selanjutnya, tahap pemeriksaan atau penemuan hukum, yaitu melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum, dengan menafsirkan fakta-fakta atau kejadian terhadap indikator yang ada pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk diinterpretasikan. Yang terakhir, tahap penerapan hukum, metode ilmu hukum positif pada tahapan analisis penelitian ini adalah suatu metode deduktif dan berorientasi pada nilai dengan kerangka berpikir sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Mengacu pada: Model Analisis pada Penelitian Hukum Doktrinal atau Normatif dalam M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 143-158.

**Interpretasi**, yaitu peristiwa pelanggaran HAM pada masa konflik Aceh, setelah dipelajari secara teliti, dicari, dan ditentukan segala bagian atau unsurnya kemudian dikaitkan dengan ketentuan kaidah hukum yang berlaku. Tahap berikutnya melangkah pada '**konstruksi yuridis**' dengan menentukan bagaimana penglihatan hukum positif terhadap peristiwa yang telah dipelajari segala unsurnya dan ditemukan relevansinya. Lalu, **sistemis**, yaitu dalam kerangka pemikiran yang sistemis berarti bahwa kegiatan ilmu hukum positif dalam tahap ini memikirkan hubungan dan konsekuensi logis atau lebih tepatnya lagi normologis dari suatu peristiwa yang ada relevansinya dengan ketentuan hukum positif secara menyeluruh. Kemudian ditetapkan suatu kesimpulan dalam wujud suatu keputusan hukum yang menuntut untuk dilaksanakan dalam praktik kehidupan, dalam hal ini dapat berupa model rekonsiliasi yang harus diterapkan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.

### **1. Pelanggaran HAM Masa Lalu di Masa Konflik Aceh**

Dari hasil temuan dan laporan tujuh lembaga (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Koalisi NGO HAM Aceh, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan -dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Aceh-, Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, *Human Right Watch*, Forum Peduli HAM, Tim Pencari Fakta Komnas HAM), maka dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat di Aceh dari tahun 1989 hingga 2005. Terdapat beberapa peristiwa penting yang menimbulkan pelanggaran HAM berat dan perlu diusut tuntas, seperti peristiwa: Bumi Flora, Timang Gajah dan Bener Meriah, Rumoh Geudong, Simpang KKA, Jambu Keupok, Gedung KNPI, Pembantaian Tgk. Bantaqiah, Pembantaian Idi Cut, Activist Rata, Operasi Rajawali, dan pelanggaran HAM saat pemberlakuan Darurat Militer I dan II. Berbagai pelanggaran HAM di Aceh terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh, di antaranya: Aceh Besar, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang.

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kategori pelanggaran HAM berat terdiri dari: Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat di Aceh dapat

diklasifikasikan ke dalam prototipe kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Aceh memenuhi beberapa unsur yang terdapat di dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, yaitu: pembunuhan; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa. Rekapitulasi jumlah korban dan kasus serta identifikasi pelanggaran HAM di Aceh berdasarkan temuan beberapa lembaga serta pelanggaran HAM di Aceh berdasarkan UU No. 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Temuan Beberapa Lembaga terkait Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Pelanggaran HAM berdasarkan Tahun<sup>7</sup>**

No	Lembaga	1989-1998	1999	2000	2001	2002	2003-2004	Lainnya	Keterangan
		DOM					Darurat Militer		
1.	Komnas HAM (Jumlah Korban dan Kasus)	1.490 korban	62 korban		-Bumi Flora: 40 korban -Timang Gajah dan Bener Meriah: 37 korban		38 korban	Tim Pemantauan dan Penyelidikan menemukan: 5 kasus pelanggaran HAM berat	a. DOM: jumlah korban dari kasus Rumoh Geudong b. 1999: jumlah korban dari kasus Simpang KKA c. 2001: jumlah korban dari kasus Bumi Flora dan Timang Gajah dan Bener Meriah d. 2003: jumlah korban dari kasus Jambu Keupok
2.	Koalisi NGO HAM. (Jumlah Kasus)	7.720 kasus							Total kasus semasa DOM yang diidentifikasi sampai Juli 1999
3.	KontraS Aceh. (Jumlah Korban dan Kasus)	6.837 korban	358 korban	4 korban	1.253 korban		1.326 korban		a. 1999: jumlah korban dari empat kasus; Simpang KKA, Gedung KNPI (kekerasan dalam operasi wibawa), Pembantaian Tgk. Bantaqiah dan santrinya, Pembantaian Idi Cut b. 2000: jumlah korban dari satu kasus; Activist RATA c. 2001: jumlah korban dari dua kasus; Bumi Flora dan

<sup>7</sup> Data ini terbatas pada hasil temuan data yang didapatkan peneliti baik dari lembaga bersangkutan maupun secara *online* (data yang dipaparkan per lembaga pada sub bab sebelumnya).

									Operasi Rajawali d. 2003-2004: jumlah korban dari kasus Darurat Militer I dan II
4.	Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan (KIPTKA) Aceh. (Jumlah Kasus)	5.000 kasus							KIPTKA yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie untuk menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan di Aceh pasca DOM
4.	Human Right Watch (HRW).							13 kategori pelanggaran HAM	Tidak ada rincian waktu, hanya disebutkan bahwa lembaga bersangkutan melakukan penelitian selama 20 tahun dan menemukan 13 kategori pelanggaran HAM Aceh “semasa konflik”.
5.	Forum Peduli HAM (Jumlah Korban dan Kasus)	a. Kasus: 7.727 b. Korban: 1.321 meninggal, 1.958 hilang, 3.430 penyiksaan, 128 pemeriksaan, 81 pelecehan seksual						597 kasus rumah dibakar, 38 kasus penjarahan emas, 122 kasus penjarahan sepeda motor, 52 kasus penjarahan mobil, dan 16.375 orang anak menjadi yatim	
6.	Tim Pencari Fakta (TPF) Komnas							Korban: 781 meninggal, 163 hilang, 368 mengalami	penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Aceh sekitar bulan Juli dan Agustus

	HAM (Jumlah Korban)							penyiksaan, 102 korban pemeriksaan, dan 102 kasus pembakaran bangunan	1998, tidak dijelaskan waktu dari pelanggaran HAM tersebut
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah, 2013.

**Tabel 2**  
**Pelanggaran HAM Berat di Aceh**

Temuan beberapa Lembaga (Pola Kekerasan, Konteks, Jenis Pelanggaran)	Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000		
	Bentuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan	Penjelasan	Terjadi di Aceh (√)
<b>Komnas HAM:</b> 1. Pembunuhan 2. Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain secara Sewenang-wenang 3. Penyiksaan 4. Penganiayaan (persekusi) 5. Perkosaan 6. Penghilangan Orang Secara Paksa <b>Koalisi NGO HAM:</b> 1. Penghilangan secara paksa ( <i>Involuntary Disappearance</i> ) 2. Pembunuhan di luar pengadilan ( <i>Extrajudicial Killing</i> )	Berbagai pola, konteks, dan jenis pelanggaran yang ditemukan beberapa lembaga dengan identifikasi tertentu karena modusnya tidak sederhana. Maka pelanggaran HAM di Aceh <i>memenuhi atau mendekati</i> unsur-unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan <sup>8</sup> berupa:	Yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.	√
	a. Pembunuhan	Sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.	√
	b. Pemusnahan	Meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang	

<sup>8</sup> Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai **bagian dari serangan yang meluas atau sistematis** yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan **secara langsung terhadap penduduk sipil** (Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

3. Pembantaian termasuk petrus ( <i>Summary or Arbitrary executions</i> ) 4. Penyiksaan ( <i>Torture</i> ) 5. Penahanan semena-mena ( <i>Arbitrary Detention</i> ) 6. Kekerasan terhadap perempuan ( <i>Violence Against Women</i> ) 7. Termasuk pelanggaran HAM terhadap <i>Human Rights Defender</i> (para pekerja HAM, seperti aktivis LSM dan mahasiswa) 8. Penangkapan sewenang-wenang ( <i>Arbitrary Arrest</i> ) <b>KontraS:</b> 1. Penembakan 2. Penyerbuan oleh aparat 3. Pembantaian oleh aparat 4. Sweeping oleh aparat Polres 5. Penghilangan orang secara paksa <b>Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh:</b> 1. Pemerkosaan dan kekerasan seksual 2. Penyiksaan dengan listrik 3. Direndam dalam kotoran 4. Memaksa tahanan untuk melakukan aktivitas seksual 5. dan pemukulan <b>Human Rights Watch:</b> 1. Pembunuhan ekstrajudisial 2. Penyerangan terhadap kaum sipil 3. Penghilangan paksa 4. Penyiksaan dan perlakuan		<p>dilakukan dengan sengaja antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.</p>	
	c. Perbudakan	Dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.	
	d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;	Pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional.	
	e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;	Cukup jelas.	√
	f. Penyiksaan;	Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik dan mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.	√
	g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;	Cukup jelas.	√ (hanya yang ditebalkan)
	h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau	Cukup jelas.	√

sewenang-wenang 5. Kekerasan seksual 6. Penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran proses hukum 7. Pemindahan paksa 8. Penjarahan ( <i>looting</i> ) yang dilakukan pada saat damai dan perampasan saat perang ( <i>pillage</i> ) 9. Pemalakan dan pembatasan kegiatan ekonomi 10. Ancaman, intimidasi dan pembatasan terhadap wartawan 11. Pembatasan ruang bergerak 12. Pembakaran sekolah 13. Kewajiban jaga malam <b>Forum Peduli HAM:</b> 1. Meninggal (pembunuhan) 2. Penghilangan orang secara paksa 3. Penyiksaan 4. Pemerkosaan 5. Pelecehan seksual 6. Rumah dibakar 7. Penjarahan emas 8. Penjarahan sepeda motor 9. Penjarahan mobil <b>Tim Pencari Fakta Komnas HAM</b> 1. Meninggal (pembunuhan) 2. Penghilangan orang secara Paksa 3. Penyiksaan 4. Pemerkosaan 5. Pembakaran bangunan	alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;		
	i. Penghilangan orang secara paksa; atau	Penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.	√
	j. Kejahatan apartheid	Perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud mempertahankan rezim itu.	

sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2013.

## 2. Tanggung Jawab Negara terhadap Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Konflik Aceh

Dalam mekanisme internasional, negara merupakan aktor atau pelaku HAM yang memegang tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya sehingga negara punya kewajiban untuk menghormati nilai dan aturan HAM yang berlaku, melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM, dan memenuhi HAM warga negaranya. Dalam mekanisme nasional, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga telah menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya, Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan tanggung jawab negara terhadap HAM secara tersirat sebagai berikut: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.” Sepanjang perjalanan konflik Aceh dan dari sekian pelanggaran HAM yang terjadi hanya empat kasus yang diselesaikan secara hukum, yaitu kasus perkosaan terhadap Sumiati di Pidie (1998), kasus penyiksaan dan pembunuhan di Gedung KNPI Lhokseumawe (1999), kasus pembunuhan massal terhadap Teungku Bantaqiah dan santrinya di Beutong Ateuh (1999) dan kasus pemerkosaan terhadap empat perempuan di Paya Bakong (2003).<sup>9</sup>

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh di antaranya adalah: (a.) Dibentuknya Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (menghasilkan dua bentuk laporan yaitu: Laporan Ringkas Tim Soeharto, Agustus 2003 dan Laporan [lengkap] 5 Subtim Soeharto, Agustus 2003) dan selanjutnya dibentuk Tim Pengkajian Kekerasan di Aceh berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 53/Komnas HAM/IX/2008, (b.) Dibentuknya Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Masa Daerah Operasi Militer (1989-1998) hingga periode transisional (1998-2003) di Aceh dan selanjutnya juga

---

<sup>9</sup> Hendra Fadli dan Asiah Uzia, **KKR Aceh dari Perspektif Korban**, *Seumike: Journal of Aceh Studies*, Volume 4, (No.1), 2009, hlm 17.

telah diputuskan akan dibentuk tim *ad hoc* untuk menangani pelanggaran HAM di Aceh pada masa lalu.

Dalam melaksanakan tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM masa lalu, terdapat beberapa hak korban yang harus diperhatikan. Secara prinsipil, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu harus memenuhi tiga hak dasar korban dan keluarganya, yaitu: hak mengetahui daripada korban (*the right to know*), hak atas keadilan bagi para korban (*the right to justice*), dan hak pemulihan bagi para korban (*the right to reparation*).<sup>10</sup>

Indonesia tidak mengenal kadaluarsa yang diatur oleh Pasal 46 UU 26/2000 dan membolehkan asas retroaktif untuk kasus pelanggaran berat HAM sesuai Pasal 43 UU 26/2000 (untuk kasus masa lalu digelar lewat Pengadilan HAM *ad hoc*).<sup>11</sup> Terkait Pengadilan HAM, masih adanya tuntutan hingga tahun 2013 (8 Tahun pasca perdamaian) menunjukkan belum terlihatnya upaya pembentukan Pengadilan HAM. Namun untuk KKR, hingga kini sudah terlihat upaya untuk pembentukan KKR tersebut, di mana DPR Aceh telah merancang peraturan daerah atau qanun untuk membentuk KKR dan sudah ada Tim Perancang Qanun KKR Aceh. Oleh sebab itu, terlepas dari berbagai permasalahan hukum terkait Pengadilan HAM dan KKR Aceh yang diatur di dalam MoU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jika merujuk pada rentang waktu terjadinya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu Aceh, maka mekanisme penyelesaian (sebagai bentuk tanggung jawab negara) yang berlaku adalah sesuai dengan yang diatur Undang-undang No. 26 tahun 2000 yang memberikan tiga mekanisme untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, yaitu: melalui Pengadilan HAM *ad hoc* (untuk kasus pelanggaran HAM sebelum UU No. 26 Tahun 2000), Pengadilan HAM (untuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi setelah 23 Nopember 2000) dan Komisi Kebenaran dan

---

<sup>10</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, **Seri Buku Saku: Mengenal HAM dan Hak Korban**, tanpa penerbit, tanpa tempat penerbitan, tanpa tahun, hlm 25.

<sup>11</sup> Usman Hamid (Koodinator Badan Pekerja Kontras), 2005, **Siaran Pers No: 22/SP/KontraSMII/200S Tentang Mou Helsinki dan Prospek Pengadilan HAM: Retroaktif Penting untuk Rakyat Aceh** (*online*), [http://www.kontras.org/tpriok/index.php?hal=siaran\\_pers&id=161](http://www.kontras.org/tpriok/index.php?hal=siaran_pers&id=161), (19 Desember 2013).

Rekonsiliasi (merujuk pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

### **3. Permasalahan Hukum Penerapan *Memorandum of Understanding* Helsinki di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait Pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Aceh**

#### **3.1. Status dan Kedudukan MoU Helsinki**

Permasalahan dari penandatanganan MoU Helsinki di antaranya seperti yang disebut oleh Direktur Center for Local Law Development Studies dan Dosen **Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**, Jawahir Thontowi, mengenai ketidakjelasan sikap akan status GAM dalam penyelesaian konflik melalui mekanisme internasional. MoU sebagai penyelesaian sengketa dalam negeri melalui mekanisme internasional di mana prinsip-prinsip utama yang harus diterapkan di antaranya adalah kehadiran kedua belah pihak sebagai subjek hukum internasional. Namun sikap tidak tegas pemerintah Indonesia terhadap GAM dengan jelas terbaca, GAM bukan subjek HI, melainkan kelompok masyarakat sebangsa.<sup>12</sup> Eksistensi MoU juga menjadi polemik, di mana sebagian pihak seperti akademisi dan anggota parlemen Aceh berpendapat bahwa secara yuridis, referensi utama untuk mengisi perdamaian Aceh bukan lagi MoU Helsinki, melainkan UU PA.<sup>13</sup> Meski demikian, bukan berarti MoU Helsinki dilupakan melainkan tetap dijadikan salah satu acuan jika muncul problem di kemudian hari.<sup>14</sup>

Pro kontra MoU Helsinki lainnya muncul tatkala sebagian pihak merasa MoU yang merupakan hasil dari kompromi politik RI-GAM memberi peluang akan adanya gesekan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai anggapan MoU Helsinki melanggar UUD 1945, maka dapat dikatakan sesungguhnya tidak ada yang dilanggar dari MoU Helsinki. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Iskandar

<sup>12</sup> Jawahir Thontowi, 2009, **Kewajiban Moral dalam MoU Helsinki** (online), <http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/15/kewajiban-moral-dalam-mou-helsinki/>, (12 Desember 2013).

<sup>13</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), **Laporan Situasi Politik dan HAM Aceh Tahun 2007: Belum Ada Jaminan Keadilan**, Banda Aceh, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2008, hlm 4.

<sup>14</sup> Wawancara 28 Desember 2007 dalam: *ibid*.



A. Gani, menyatakan MoU Helsinki tersebut tidak melanggar UUD 1945 karena telah disetujui oleh DPR sebagai salah satu lembaga negara dan masih mengacu pada UUD 1945, yakni Aceh tetap dalam bingkai NKRI.<sup>15</sup>

Mengenai kekuatan MoU Helsinki dapat kita kembalikan pada kekuatan mengikat MoU itu sendiri, sebagaimana dikemukakan Bimo Prasetyo S.H., dan Asharyanto S.H.I sebagai berikut:

Sejatinya, MoU belumlah melahirkan suatu hubungan hukum karena MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian. Kekuatan mengikat dan memaksa MoU pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada para pihak yang membuatnya. Di samping itu, walaupun MoU merupakan perjanjian pendahuluan, *bukan berarti* MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya.<sup>16</sup>

Maka menurut penulis, MoU merupakan fakta politis, sosiologis dan historis sebagai embrio yang ketentuan-ketentuan di dalamnya wajib dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. MoU Helsinki tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun MoU Helsinki tetap menjadi sebuah pondasi/ acuan bagi perdamaian Aceh.

### 3.2. Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh

- a. Pasal 228 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pengaturannya tidak menjelaskan jenis pengadilan HAM apa yang digunakan untuk Aceh dan hanya menangani perkara yang terjadi setelah UU tersebut diundangkan.
- b. Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur bahwa Pengadilan HAM di Aceh dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU tersebut diundangkan, namun hingga 2013 Pengadilan HAM tersebut belum dibentuk.

<sup>15</sup> Erwin, 2005, **MoU Helsinki Tak Langgar UUD 1945** (*online*), <http://www.mimbar-opini.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=810>, (11 Desember 2013).

<sup>16</sup> Bimo Prasetyo dan Asharyanto, 2013, **Perbedaan antara Perjanjian dengan MoU** (*online*), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou>, (27 September 2013).

### 3.3. Pembentukan KKR di Aceh

- a. Pasal 229 ayat (2) menyatakan bahwa KKR di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan KKR. Pada Pasal 229 ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR. Namun, MK telah membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006.
- b. Pasal 260 yang menyebutkan bahwa KKR di Aceh berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diundangkan, namun hingga 2013 KKR tersebut belum dibentuk.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- 1) Dari hasil temuan dan laporan tujuh lembaga (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Koalisi NGO HAM Aceh, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan -dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Aceh-, Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, *Human Right Watch*, Forum Peduli HAM, Tim Pencari Fakta Komnas HAM), maka dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat di Aceh dari tahun 1989 hingga 2005. Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kategori pelanggaran HAM berat terdiri dari: Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat di Aceh dapat diklasifikasikan ke dalam prototipe kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Aceh memenuhi beberapa unsur yang terdapat di dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, yaitu: pembunuhan; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang

didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa.

- 2) Oleh karena Indonesia tidak mengenal kadaluarsa yang diatur oleh Pasal 46 UU 26/2000 dan membolehkan asas retroaktif untuk kasus pelanggaran berat HAM sesuai Pasal 43 UU 26/2000 (untuk kasus masa lalu digelar lewat Pengadilan HAM ad hoc), maka terlepas dari berbagai permasalahan hukum terkait Pengadilan HAM dan KKR Aceh yang diatur di dalam MoU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tetap dapat dilaksanakan. Jika merujuk pada rentang waktu terjadinya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu Aceh, mekanisme penyelesaian (sebagai bentuk tanggung jawab negara) yang berlaku adalah sesuai dengan yang diatur Undang-undang No. 26 tahun 2000 yang memberikan tiga mekanisme untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, yaitu: melalui Pengadilan HAM ad hoc (untuk kasus pelanggaran HAM sebelum UU No. 26 Tahun 2000), Pengadilan HAM (untuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi setelah 23 Nopember 2000) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (merujuk pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).
- 3) Beberapa permasalahan hukum penerapan MoU Helsinki ke dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di antaranya adalah terkait dengan:
  - a. Status dan kedudukan MoU Helsinki
  - b. Pengadilan HAM (diatur dalam Butir 2.2. MoU Helsinki):
    - (1) Pasal 228 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: tidak menjelaskan jenis pengadilan HAM apa yang digunakan untuk Aceh dan hanya menangani perkara yang terjadi setelah UU tersebut diundangkan.
    - (2) Pasal 259 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: Pengadilan HAM di Aceh dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun

sejak UU tersebut diundangkan, namun hingga 2013 Pengadilan HAM tersebut belum dibentuk.

c. KKR (diatur dalam Butir 2.3. MoU Helsinki):

- (1) Pasal 229 ayat (2) menyatakan bahwa KKR di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan KKR. Pada Pasal 229 ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR. Namun, MK telah membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006.
- (3) Pasal 260 yang menyebutkan bahwa KKR di Aceh berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diundangkan, namun hingga 2013 KKR belum dibentuk.

## 2. Saran

- 1) Pemerintah pusat maupun daerah tetap berkomitmen melaksanakan amanah MoU Helsinki dan perlu melakukan evaluasi terkait pengaturan tentang penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh di dalam UUPA agar memenuhi rasa keadilan korban.
- 2) Meskipun di dalam UUPA disebutkan bahwa Pengadilan HAM hanya menyelesaikan perkara yang terjadi setelah UUPA diundangkan, namun Indonesia tidak mengenal kadaluarsa yang diatur oleh Pasal 46 UU 26/2000 dan membolehkan asas retroaktif untuk kasus pelanggaran berat HAM sesuai Pasal 43 UU 26/2000. Beberapa alternatif pengadilan jika pengadilan HAM dalam ketentuan MoU Helsinki tidak bisa diberlakukan secara surut untuk kasus di Aceh, di antaranya adalah: melalui Pengadilan HAM Nasional, yaitu melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc* (untuk kasus pelanggaran HAM sebelum UU No. 26 Tahun 2000), Pengadilan HAM (untuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi setelah 23 Nopember 2000), Pengadilan Pidana Umum, atau merumuskan peraturan pelaksanaan dan implementasi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

- 3) KKR di Aceh segera dibentuk untuk normalisasi Aceh agar kompensasi, penghargaan, penghormatan, dan berbagai bentuk kegiatan di dalamnya dapat memenuhi hak-hak dasar korban. KKR di Aceh ditempuh karena adanya keterbatasan pengadilan dan konteks transisi yang mengakibatkan tidak memungkinkannya keadaan dan sulitnya melakukan penuntutan sehingga KKR tersebut sebaiknya tidak difungsikan sebagai pengganti proses peradilan (*substitusi*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto: Laporan Bersama ICTJ dan KontraS*, International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tempat penerbitan tidak dicantumkan, 2011.

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Aceh dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, **Seri Buku Saku: Mengenal HAM dan Hak Korban**, tanpa penerbit, tanpa tempat penerbitan, tanpa tahun.

-----, *Laporan Situasi Politik dan HAM Aceh Tahun 2007: Belum Ada Jaminan Keadilan*, Banda Aceh, KontraS Aceh, 2008.

M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Suparman Marzuki, **Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity**, Erlangga, Jakarta, 2012.

### Artikel dalam Jurnal dan Buku

Afridhal Darmi (Eds), **Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan**, Aceh Institute Press, Banda Aceh, 2010.

Hendra Budian (Eds), **Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan**, Aceh Institute Press, Banda Aceh, 2010.

Hendra Fadli dan Asiah Uzia, **KKR Aceh dari Perspektif Korban**, *Seumike: Journal of Aceh Studies*, Volume 4, (No.1), 2009.

### Artikel, Berita, dan Makalah dalam Internet

Bimo Prasetyo dan Asharyanto, **Perbedaan antara Perjanjian dengan MoU** (*online*), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou>, (27 September 2013), 2013.

Eddy MT Sianturi, **Implikasi Kesepakatan Damai MoU Helsinki terhadap Integrasi Nasional** (*online*), <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/implikasi-kesepakatan-damai-mou-helsinki-terhadap-integrasi-nasional>, (1 Oktober 2012), 2011.

Erwin, **MoU Helsinki Tak Langgar UUD 1945** (*online*),

<http://www.mimbar-opini.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=810>, (11 Desember 2013), 2005.

Jawahir Thontowi, **Kewajiban Moral dalam MoU Helsinki** (*online*), <http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/15/kewajiban-moral-dalam-mou-helsinki/>, (6 Januari 2014), 2009.

Usman Hamid (Koodinator Badan Pekerja Kontras), **Siaran Pers No: 22/SP/KontraSMII/200S Tentang Mou Helsinki dan Prospek Pengadilan HAM: Retroaktif Penting untuk Rakyat Aceh** (*online*), [http://www.kontras.org/tpriok/index.php?hal=siaran\\_pers&id=161](http://www.kontras.org/tpriok/index.php?hal=siaran_pers&id=161), (19 Desember 2013), 2005.

### **Internet berupa E-mail Pribadi**

Sriyana ([sri\\_yana@yahoo.com](mailto:sri_yana@yahoo.com)) permohonan data melalui email, 17 Desember 2013, **Laporan Tim Aceh (BAB I & II\_091109)**, E-mail kepada Annisha Andini ([annishaandini@gmail.com](mailto:annishaandini@gmail.com)).

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Peraturan Terkait Lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie/ BW).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- IV/2006 tentang  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan  
Rekonsiliasi.

Rancangan Qanun KKR Aceh.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisha Putri Andini

NIM : 105010104111048

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas/ Konsentrasi : Hukum/ Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

*Tanggung Jawab Negara terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Aceh Pasca Memorandum of Understanding Helsinki.*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang

Pada tanggal : 21 Januari 2014

Yang Menyatakan,



(Annisha Putri Andini)